

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Tinjauan umum tentang Organisasi**

##### **1. Pengertian organisasi**

Kata organisasi berasal dari bahasa Inggris *Organization* yang bentuk infinitifnya adalah *to organise*. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani *organon* yang berarti *sebagian* atau *susunan*.<sup>9</sup>

Sebelum peneliti memberikan arti organisasi, maka akan lebih baik bila dikemukakan terlebih dahulu beberapa pendapat tentang pengertian organisasi:

James d. Mooney

*“organisation is the form of every human association for the attainment of common purpose (organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama)”*.<sup>10</sup>

Rollin C. Davis

*“Organization is any group of individuals that is working toward some common and under leadership (organisasi adalah sesuatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja kearah tujuan bersama dibawah kepemimpinan)”*.

---

<sup>9</sup> Magdalena Lumbangtoruan, *Eksiklopedi Ekonomi Bisnis dan Management*, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992), hlm 374

<sup>10</sup> Mohyi Ach., *Teori Dan Perilaku Organisasi*, (Malang: UMM Press, 1999), 1

Duright Waldo

*“organization is the structure of authoritative and habitual personal interrelation in an administrative systems”* (organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu system administrasi.

John R. Dalam Moekijat

Mendefinisikan organisasi sebagai gabungan orang-orang yang bekerjasama dalam suatu pembagian kerja untuk mencapai tujuan bersama.<sup>11</sup>

DR.Arni muhammad mengutip dari Edgar A.Schein

Menyatakan bahwa organisasi adalah koordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggungjawab manusia sebagai anggota organisasi tersebut.<sup>12</sup>

Dengan mempelajari definisi-definisi tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu definisi, yaitu organisasi adalah suatu wadah atau setiap bentuk perserikatan kerjasama manusia (didalamnya) ada struktur organisasi, pembagian tugas (hak dan tanggungjawab) untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Jadi jika dua orang atau lebih berserikat atau bekerjasama untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang mana bila mereka kerjahn sendiri-sendiri

---

<sup>11</sup> Moekijat, *Asas-Asas Perilaku Organisasi*, (Bandung:Mandar Maju,1990),halm 45-46

<sup>12</sup> DR.Arni Muhammad, *komsikasi Organisasi*, (Jakarta:Bumi Aksara,1989), hlm 23

sulit untuk diselesaikan maka terjadilah suatu organisasi, minimal sederhana bentuknya. Semakin banyak orang yang tergabung dalam kerjasama tersebut, maka kerjasama harus semakin disempurnakan baik itu bentuknya (strukturnya), aturannya maupun aktivitasnya, karena hal itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut semakin besar dan tentunya permasalahanpun akan semakin kompleks pula.

Dari pengertian organisasi diatas maka kita dapat menentukan beberapa unsur yang mana dengan unsur-unsur tersebut suatu organisasi akan terbentuk. unsur-unsur itu antara lain:

- a. Sekelompok orang. Dimana dari orang-orang tersebut ada yang bertindak sebagai pemimpin dan bawahannya.
- b. Kerjasama dengan orang yang berserikat. Dengan adanya kerjasama antara orang-orang yang berserikat tersebut, maka tentu ada pula pembagian tugas (wewenang), tanggungjawab, hak dan kewajiban, struktur organisasi, aturan-aturan asas atau prinsip yang mengatur kerjasama tersebut.
- c. Tujuan bersama hendak dicapai. Tujuan ini merupakan kesepakatan dari orang yang berserikat tersebut yang akhirnya dikenal dengan istilah “tujuan organisasi”

## 2. **Sifat-sifat organisasi**

Sifat-sifat organisasi dapat dibagi dua macam, yaitu organisasi formal

dan organisasi informal.<sup>13</sup>

a. Organisasi formal

Ciri-ciri organisasi yang bersifat formal adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh anggota organisasi diikat oleh suatu persyaratan formal sebagai bukti keanggotaannya. Misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) sebagai organisasi formal yang diikat oleh sesuatu yang harus dimiliki seperti kartu pegawai (karpeg), guru dan dosen menurut undang-undang guru dan dosen harus disertifikasi.
- 2) Kedudukan, jabatan, dan pangkat yang terdapat dalam organisasi dibuat secara hierarkis dan piramidal yang menunjukkan tugas, kedudukan, tanggungjawab, dan wewenang yang berbeda-beda.
- 3) Setiap anggota yang memiliki jabatan tertentu secara otomatis memiliki wewenang dan tanggungjawab yang membawahi jabatan anggota dibawahnya. Dengan demikian hak memerintah berada bersamaan dengan hak perintah, hak melarang bersamaan dengan hak untuk tidak mengerjakan kegiatan tertentu. Jabatan-jabatan itu berikut wewenang yang dimilikinyaberhubungan dengan seluruh kinerja bawahannya.
- 4) Hak dan kewajiban melekat sepenuhnya pada anggota organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban segala sesuatu

---

<sup>13</sup> Drs.Hikmat, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 179

yang harus dikerjakan.

- 5) Pelaksanaan kegiatan diatur menurut jabatannya masing-masing, tetapi setiap fungsi jabatan dengan tugasnya saling berhubungan dan melakukan kerjasama.
- 6) Seluruh kegiatan direncanakan secara musyawarah mufakat dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Hubungan kerjasama dilakukan menurut tingkat jabatan struktural yang jelas yang berimplikasi secara langsung pada perbedaan penggajian dan tunjangan masing-masing anggota organisasi.
- 8) Adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan sistem kinerja organisasi. Norma lembaga perlu ditetapkan untuk mengatur cara kerja masing-masing pejabat dan seluruh pelaksana kegiatan dalam organisasi.

b. Organisasi informal

Sifat organisasi informal melekat pada organisasi formal, artinya secara substansial tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya dalam status organisasi dalam cakupan wewenang pemerintah dan izin operasional suatu organisasi. Misalnya, lembaga pendidikan sekolah bersifat formal, sedangkan lembaga yang menyelenggarakan kursus merupakan lembaga informal. Tidak akan ada sekolah formal jika tidak berdampinga dengan organisasi informal, yaitu lingkungan masyarakat, komunitas masyarakat, yang merupakan konsumen pendidikan formal.

Kelarga adalah organisasi informal yang berhubungan secara langsung dengan dengan lembaga pendidikan formal, seperti sekolah, karena anak didik dimasukkan ke lembaga pendidikan oleh orang tua atau walinya.

Masyarakat adalah struktur organisasi yang lebih luas daripada keluarga. Masyarakat adalah organisasi yang terdiri atas berbagai keluarga dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda. Secara definitif, masyarakat tergolong organisasi, bahkan menciptakan ribuan jenis organisasi. Ciri khusus dari organisasi informal adalah tidak adanya kontak diantara anggota yang diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.<sup>14</sup> Kontak terjadi tanpa ada aturan formal. Sebagaimana komunitas masyarakat yang tinggal di lingkungan atau wilayah tertentu dapat dikatakan sebagai organisasi informal, kontak yang terjadi merupakan interaksi mekanis yang secara alami merupakan bagian dari kebutuhan individu masing-masing.

Interaksi mekanik tidak memerlukan aturan baku karena menjadi bagian dari kepentingan masyarakat sendiri dalam membangun hubungan dengan sesama anggota, misalnya pelaksanaan gotongroyong memperbaiki jembatan maka seluruh masyarakat yang mau membantu memperbaiki jembatan dapat langsung ikut serta dengan berbagai cara tanpa harus dikomando atau diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Adapun interaksi organik muncul disebabkan oleh adanya

---

<sup>14</sup> ,ibid., Hlm 181

peraturan organisasi serta tujuan yang telah disepakati bersama. Setiap anggota organisasi tidak melaksanakan kegiatan lebih dahulu mengacu pada wewenangnya yang resmi. Misalnya, ketua bidang organisasi hanya akan melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan keorganisasian.

Dengan ilustrasi diatas dapat dipahami bahwa organisasi informal secara mekanik tetap melakukan hubungan fungsional tetapi tidak terikat oleh aturan, sedangkan organisasi formal diatur secara organik, baik tugas, fungsi maupun otoritas anggota dalam organisasi. Organisasi formal dan organisasi informal, jika dilihat dari upaya menacapai tujuannya memiliki unsur-unsur kinerja yang sama, terutama dalam melakukan kontak atau komunikasi dan terjalinnya kerjasama antara anggota organisasi.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa substansi organisasi formal maupun informal sifatnya sama, yaitu adanya hubungan antar orang, kerjasama, dan tujuan yang hendak dicapai. Perbedaannya terletak pada formal atau tidaknya ketiga ciri tersebut dilaksanakan.

Kerjasama yang dilakukan dalam organisasi berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

- a. Kerjasama internal organisasi, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh semua unit organisasi atau semua bidang yang terdapat dalam organisasi.

- b. Kerjasama eksternal organisasi, yaitu kerjasama yang dilakukan antar organisasi.

Dalam pelaksanaan kinerja organisasi formal biasanya terdapat prinsip organisasi yang sangat penting, seperti adanya prinsip mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Adapun dalam organisasi informal prinsip tersebut tidak berlaku.

### 3. Prinsip-prinsip organisasi

Prinsip adalah landasan atau pijakan yang juga sering disebut sebagai referensi disebut sebagai referensi utama dalam memulai pelaksanaan kegiatan. Dalam berorganisasipun harus ada prinsip tertentu agar pelaksanaan kegiatan organisasi tercapai sesuai dengan tujuan. Prinsip juga sering diartikan dengan kaidah dan titik tolak kegiatan yang tidak diubah.

Prinsip-prinsip organisasi menurut Manulang<sup>15</sup> adalah sebagai berikut.

- a. Adanya tujuan yang jelas

Tujuan pendidikan harus ditetapkan sebelum perencanaan kegiatan dirumuskan karena rencana-rencana harus merujuk dan mengarah pada upaya tercapainya tujuan organisasi. Tujuan akan menuntun organisasi pada visi dan misinya yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan merupakan arah dan pedoman, yaitu koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisme.

---

<sup>15</sup> Drs. Hikmat, M. Ag., Manajemen Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hal 189-190



b. Prinsip kerja sama

Tolak ukur kesuksesan organisasi adalah adanya kerja sama diantara semua anggota organisasi, yaitu:

- 1) Pembagian kerja yang jelas.
- 2) Pendelegasian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang sistematis;
- 3) Rentangan kekuasaan yang hirarkisnya jelas dilihat dari tugas dan fungsinya dalam organisasi
- 4) Kesatuan perintah dan tanggung jawab atau kesatuan komando yang jelas.
- 5) Koordinasi yang terpadu dan integral.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo,<sup>16</sup> ada sebelas prinsip organisasi, yaitu sebagai berikut:

1) Kesatuan komando

Penyusunan setiap organisasi harus mengikuti garis tata hubungan atasan, yaitu mulai dari bawah keatas sampai berakhir pada satu titik, yaitu puncak dari organisasi.

Semua arus komando/perintah, laporan, arus informasi, arus kerja dan sebagainya, harus melalui garis hirarki yang jelas. Akan tetapi, alangkah baiknya tidak terlalu kaku, fleksibel dalam menghadapi perkembangan dan perubahan situasi dan kondisi.

---

<sup>16</sup> Prajudi atmosudirdjo, *dasar-dasar ilmu Administrasi*, jilid II, 1979, h. 90

## 2) Pembagian kerja

prinsip pembagian kerja dapat dibagi empat macam, yaitu:

- a) prinsip pembagian kerja atas dasar wilayah/daerah.
- b) Prinsip pembagian kerja menurut produk/barang yang dihasilkan
- c) Prinsip pembagian kerja menurut jumlah rang bawahan
- d) Prinsip pembagian kerja menurut fungsi

## 3) Keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan

Harus ada keseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan sehingga tidak ada tumpah-tindih antara satu jabatan dan jabatan lain.

## 4) Prinsip komunikasi

Adanya pertukaran informasi diantara anggota organisasi, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara bersama-sama. Dengan demikian, permasalahan yang muncul dapat dipecahkan secara mudah.

## 5) Kontinuitas/kesinambungan

Setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan jadwal yang ditetapkan. Semua aturan yang menyangkut aktifitas anggota yang diatur melalui sistem pembagian kerja yang terpadu, sehingga tidak terganggu oleh keadaan cuti, libur hari raya, dan sebagainya.

## 6) Prinsip koordinasi

Dengan prinsip pembagian kerja dan kesinambungan kerja, prinsip koordinasi dalam berorganisasi sangat penting untuk dilaksanakan, agar tidak terjadi *missmanagement* dan kesimpangsiuran komunikasi antar anggota

organisasi.

7) Saling asuh

Prinsip saling asuh merupakan pelaksanaan pembinaan dari atasan kepada bawahan. Terjadinya pengayoman yang berjalan secara kekeluargaan sehingga tidak terjadi konflik organisasi yang berakibat hancurnya hubungan antar anggota.

8) Pelimpahan kekuasaan/delegasi

Pelimpahan wewenang harus terjadi dalam organisasi karena atasan adakalanya berhalangan, dan kegiatan organisasi tidak dapat dilaksanakan oleh satu orang anggota organisasi. Pelimpahan wewenang dilaksanakan dengan syarat-syarat:

- a) Wewenang dilimpahkan kepada orang yang tepat
- b) Adanya kejelasan wewenang yang dilimpahkan
- c) Adanya alasan terjadinya pelimpahan yang terbuka
- d) Berdasarkan kebijakan yang tertulis dalam bentuk surat keputusan
- e) Merupakan bentuk dari pemberian wewenang didasarkan pada hirarki kekuasaan
- f) Didasarkan pada kekuasaan
- g) Didasarkan pada prestasi kerja
- h) Pengamatan, pengawasan, dan pengecekan

Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kinerja anggota organisasi sehingga berbagai penyimpangan dapat diketahui. Jika ada masalah akan

mudah diantisipasi dan dicarikan jalan keluarnya sesegera mungkin.

9) Asas tahu diri

Asas ini mengajarkan agar semua anggota organisasi menyadari kedudukannya dalam organisasi sehingga tidak melakukan pekerjaan yang bukan merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang utama dan melakukan kerja sama, bukan menyerobot tugas anggota lain.

10) Kehayatan

Asas ini berhubungan dengan sikap dan mental anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan asas ini, anggota organisasi sebaiknya bekerja berdasarkan komitmen yang kuat pada organisasi, loyalitas yang maksimal dan sikap yang penuh pengabdian, dalam arti ketaatan terhadap peraturan, ketaatan pada kewajiban religius, ketaatan pada tanggungjawab sebagai pribadi dan sebagai warga negara.

**4. Tujuan Organisasi**

Tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa akan datang yang senantiasa berusaha dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Dengan demikian tujuan tersebut menciptakan pula sejumlah pedoman bagi landasan kegiatan organisasi. Tujuan juga merupakan legitimasi yang membenarkan setiap kegiatan organisasi, serta tentunya eksistensi organisasi itu sendiri, selain itu, tujuan berfungsi juga sebagai patokan yang dapat dipergunakan oleh anggota organisasi maupun kalangan

luar untuk menilai keberhasilan organisasi, misalnya mengenai segi efektifitas maupun efisien. Menurut cara yang mirip ini pula tujuan organisasi juga berfungsi sebagai tolak ukur bagi para ilmuwan di bidang organisasi guna yang berusaha mengetahui seberapa jauh suatu organisasi berjalan secara baik.

Organisasi merupakan unit sosial yang berusaha mencapai tujuan tertentu. Hakikat organisasi tidak lain adalah mengejar tujuan. Tetapi apabila organisasi sudah terbentuk, organisasi akan mempunyai kebutuhannya sendiri, dan semua ini kadang-kadang menyebabkan organisasi malah harus tunduk kepada kebutuhan tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan suatu organisasi pengumpul dana yang lebih banyak mengeluarkan uang untuk membiayai tenaga staf bangunan dan publisitas, dan kurang menyumbang derma sesuai tujuan pengumpulan dana tersebut. Dalam keadaan seperti itu tampak jelas bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri organisasi tidak lagi mengejar cita-citanya yang semula, padahal sebenarnya usaha untuk melayani kebutuhannya sendiri harus disesuaikan dengan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tidak jarang beberapa organisasi telah bertindak sedemikian jauh sehingga seolah-olah telah mengabaikan tujuan semula dan kemudian mengejar cita-cita baru yang dirasakan lebih cocok dengan kebutuhan organisasi. Keadaan yang seperti inilah yang diartikan dengan tujuan organisasi yang pada akhirnya malah menjadi abdi organisasi dan bukan

“tuan” organisasi.<sup>17</sup>

#### Ciri-Ciri Tujuan Organisasi

Tujuan organisasi adalah keadaan yang dikehendaki pada masa akan datang yang senantiasa dikejar oleh organisasi agar dapat direalisasikan. Organisasi itu sendiri dapat atau bahkan juga tidak mampu mewujudkan citra masa depan yang di cita-citakan sejak semula. Tetapi apabila tujuan itu telah tercapai, tujuan tidak lagi berfungsi menjadi citra yang membimbing organisasi, dan kemudian malah membaaur dengan organisasi lingkungannya.

Dalam pengetahuan ini suatu tujuan tidak pernah ada, tujuan itu sendiri merupakan suatu keadaan yang sengaja dikejar, dan bukan keadaan yang sudah dimiliki sejak semula. Keadaan masa depan seperti itu, meskipun hanya merupakan citra dan hanya gambaran belaka, mengandung daya sosiologis yang benar-benar riil dan senantiasa mempengaruhi aksi maupun reaksi masa kini.

Tujuan organisasi tidak lain ialah mencari keuntungan. Dalam kaitan ini usaha untuk mengejar keuntungan merupakan suatu pilihan karena dipandang sebagai cara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun organisasi.

Tetapi menurut amitai etzioni,<sup>18</sup> yang dimaksud dengan tujuan

---

<sup>17</sup> Amitai Etzioni, *Organisasi-Organisasi Modern*, (Jakarta: UI Press), hlm 8

<sup>18</sup> Ibid., hlm 9

organisasi yang sebenarnya adalah keadaan masa depan yang menjadi sasaran sebagian besar sarana organisasi dan tanggung jawab sebagian besar partisipan di bidang organisasi yang mempunyai prioritas tinggi apabila terdapat konflik dengan tujuan lain yang dinyatakan dengan tegas tetapi tidak mempunyai sumber daya. Kadang-kadang dengan menciptakan hubungan pribadi yang intim dengan para tokoh organisasi akan lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui sejauh mana para informan menyadari penyimpangan yang terjadi antara tujuan yang sebenarnya dengan tujuan yang dikemukakan. Tetapi pada umumnya tidaklah bijaksana untuk terlalu mengharapkan informasi mengenai tujuan organisasi yang sebenarnya hanya dari hasil wawancara semata. Untuk itu seringkali perlu dilakukan penelitian terhadap alokasi sumber daya dan arah usaha sebagai metode riset komplementer guna memperoleh hasil yang lebih memuaskan.

## **5. Organisasi Sosial**

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Organisasi sosial masyarakat adalah dimana terdapat suatu struktur organisasi dan suatu faktor, yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota

kelompok-kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor- faktor itu yang terdiri dari dimana merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, ideologi yang sama, politik yang sama. Hal ini merupakan ikatan yang bersifat pokok untuk jangka waktu tertentu.

Manusia harus berhubungan dengan manusia lain dalam kondisi emosional dan psychis dimana amat dipengaruhi oleh relasi sosial. Dengan kata lain seseorang itu pada satu ketika menjadi susah atau bergembira dan riang hatinya, disebabkan oleh pengaruh sikap penilaian, anggapan-anggapan yang diterima oleh orang lain. Dari sinilah jelas bahwa bagi kesejahteraan badan dan rohaniannya, manusia bersama- sama harus menciptakan satu kondisi sosial yang harmonis.

Kodrat alamiah manusia sebagai makhluk sosial-psychis itu menyebabkan timbulnya bentuk-bentuk dari organisasi dan relasi antara manusia, yang terdiri dari dua landasan yaitu;

- a. Organisasi symbiotik yang terdiri semata-mata atas tingkah laku fisik yang bersifat otomatis.
- b. Organisasi sosial yang berdiri atas komunikasi dengan menggunakan sistem lambang.

Kontak dengan menggunakan sistem lambang menimbulkan interaksi sosial yang berlaku pada dataran pancaindera, emosi dan intelektual. Apabila kita berbicara tentang organisasi sosial, maka yang



dimaksud ialah, bahwa untuk mencapai tujuannya timbul kelompok sosial dari usaha

tersebut. Dengan perkataan lain, organisasi sosial mempunyai aspek fungsi dan aspek struktur. Dalam aspek fungsionalnya organisasi sosial itu memperhatikan manifestasinya dalam aktivitas kolektif dari manusia untuk mencapai tujuannya, yaitu dari memelihara, mendidik sampai kepada melakukan peperangan. Dan dari aktivitas kolektif itu timbul kelompok-kelompok yang menjalankan aktivitas seperti keluarga, negara dan organisasi sosial lainnya. Secara keseluruhan maka organisasi sosial dilihat dari sudut implikasi strukturalnya meliputi struktur dari kelompok sosial, pola umum baru kebudayaan manusia pada setiap waktu dan tempat dan seluruh framework dari pada pranata-pranata sosial. Organisasi sosial pada dasarnya adalah produksi dari pada kodrat manusia.

Selanjutnya apabila kita pelajari kehidupan sosial manusia, maka tampak adanya kenyataan yang tidak dapat diingkari.

- a. Bahwa manusia individu atau kelompok berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mendapatkan jaminan keamanan dan jika mungkin mencapai satu tingkat kemakmuran yang diinginkan.

- b. Bahwa untuk mendapatkan kondisi yang esensial bagi kelangsungan hidup dan keamanan, diperlukan adanya ketertiban sosial dalam derajat yang tinggi.
- c. Bahwa untuk mencapai derajat ketertiban sosial yang tinggi itu diperlukan adanya satu tata pengaturan sosial kultur serta mekanisme yang dapat digunakan bagi pelaksanaan pengaturan itu.

Adapun pengaturan dari pada tata-hubungan jika ada dua orang atau lebih yang hendak mengadakan hidup bersama memerlukan beberapa syarat yaitu; (1) Harus ada ukuran yang tetap dalam tata hubungan sosial yang dapat diterima oleh anggota-anggota kelompok, (2) Harus ada kekuasaan atau otoritas yang mempunyai kekuasaan memaksa dalam melaksanakan tata-hubungan sosial, (3) Adanya pengaturan dan penyusunan individu-individu dalam kelompok-kelompok dan lapisan sosial tertentu yang menggambarkan adanya koordinasi dan subkordinasi, (4) Anggota-anggota yang hidup dalam berbagai bidang, dapat hidup dalam suasana harmoni, yang saling memberi kekuasaan, (5) Adanya tingkah laku yang merupakan standar dan telah disalurkan atau dipaksakan dengan mekanisme tekanan-tekanan sosial, yang menjadi satu pola yang merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia.

Organisasi sosial yang meliputi lembaga-lembaga yang menetapkan posisi dari laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Kategori ini terbagi dalam dua kelas lembaga yang timbul dari kekerabatan, badan lembaga-lembaga yang timbul dari kekerabatan, badan lembaga yang berkembang dari asosiasi bebas di antara individu-individu. Struktur kekerabatan meliputi keluarga dan pengembangannya sampai kelompok-kelompok. Asosiasi bebas yang tidak dibangun atas dasar kekerabatan sex dan umur dan dalam arti yang lebih luas. Struktur sosial itu juga meliputi relasi sosial yang mempunyai karakter politik berdasarkan atas daerah tempat tinggal dan status.

## **B. Tinjauan Umum Organisasi IPNU – IPPNU**

1. Latar belakang pendirian IPNU – IPPNU
  - a. Periode Perintis

Munculnya organisasi IPNU-IPPNU adalah bermula dari adanya jam'iyah yang bersifat local atau kedaerahan, wadah yang berupa kumpulan pelajar dan pesantren yang kesemuanya dikelola dan diasuh oleh ulama'. Jam'iyah tersebut tumbuh dan berkembang diberbagai daerah hamper diseluruh belahan bumi Indonesia misalnya jam'iyah dzibaan, yasinan dll, yang kesemuanya memiliki jalur tertentu dan satu sama lain tidak berhubungan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan nama yang terjadi didaerah masing-masing, mengingat lahirnya pun atas inisiatif sendiri-sendiri. Di

Surabaya putra dan putri Nahdlotul Ulama' mendirikan perkumpulan yang diberi nama Tsamrotul Mustafidzin pada tahun 1936. Tiga tahun kemudian tahun 1939 lahir persatuan santri Nahdlotul Ulama' atau PERSANU. Tahun 1941 lahir persatuan murid NO (PERMONO) pada saat itu bangsa Indonesia mengalami pergolakan melawan penjajah Jepang. Sehingga terbentuk IMANU atau Ikatan Murid Nahdlotul Ulama' di Kota Malang pada tahun 1945.

Di Madura berdiri Ijtima'ut Tholabiyah pada tahun 1945. Meskipun bersifat pelajar Keenam Jam'iyah atau perkumpulan tersebut tidak berdiam diri, ikut pula dalam perjuangan melawan penjajah. Tahun 1950 di Semarang berdiri ikatan Mubaligh Nahdlotul Ulama' dengan anggota masih remaja. Pada tahun 1953 di Kediri berdiri PERPANU (Persatuan Pelajar Nahdlotul Ulama') pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama' (IPNU) pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama' (IPNU) dan masih banyak yang tak tercantum dalam naskah ini. Titik awal inilah yang menginspirasi para perintis pendiri IPNU-IPPNU untuk menyatukan langkah dalam satu perkumpulan.

#### b. Periode Kelahiran

Aspek-aspek yang melatarbelakangi IPNU-IPPNU berdiri antara lain:

- 1) Aspek Ideologis Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan berhaluan Ahlul Sunnah Wal Jama'ah, sehingga untuk melestarikan paham tersebut perlu di siapkan kader-kader

penerus yang nantinya mampu mengkoordinir, mengamalkan dan mempertahankan faham tersebut dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

- 2) Aspek Paedagogis / Pendidikan Adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar umum dan pelajar pesantren.
- 3) Aspek Sosiologis Adanya persamaan tujuan, kesadaran dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama' dan penerus perjuangan bangsa.

Gagasan untuk menyatukan langkah tersebut dalam muktamar ma'arif pada tanggal 20 jumadil akhir 1373 H, bertepatan dengan tanggal 24 pebruari 1954 di Semarang. Usulan ini dipelopori oleh pelajar-pelajar dari Yogyakarta, Solo dan Semarang yang diwakili oleh Sofyan Cholil Mushal, Abd. Ghoni, Farida Ahmad, Maskup dan Tolkhah Mansur. Muktamar menerima usulan tersebut dengan suara bulat dan mufakat dilahirkan oleh suatu organisasi yang bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlotul Ulama') dengan ketua M. Tolchah Mansur serta pada tanggal itu ditetapkan hari lahir IPNU. Lahirnya IPNU merupakan organisasi termuda dilingkungan Nahdlotul Ulama'. Sebagai langkah awal untuk memasyarakatkan IPNU, maka pada tanggal 29 April sampai 1 Mei 1954 diadakan pertemuan di Surakarta yang dikenal dengan Kolida / pertemuan lima daerah yaitu meliputi Yogyakarta, Semarang, Kediri, Surakarta, dan Jombang, menetapkan sebagai pucuk

pimpinan sekarang pimpinan pusat serta merencanakan usaha untuk mendapatkan legitimasi dari Nahdlotul Ulama' secara formal. Usaha mencari legitimasi ini diwujudkan dengan mengirimkan delegasi pada Mukhtamar UN ke X di Surabaya pada tanggal 8-14 September 1954. Delegasi tersebut dipimpin oleh M. Tolchah Mansur, Abdul Ghani, Farida Ahmad dengan perjuangan yang optimal akhirnya IPNU mendapat pengakuan dengan syarat beranggotakan putra saja, sedangkan putri akan diadakan organisasi tersendiri.

Pada tanggal 28 Pebruari sampai 3 Mart 1955 IPNU mengadakan kongres pertama di Malang, bersamaan itu pula di Solo terbentuklah Ikatan Pelajar Putri Nahdlotul Ulama' (IPPNU) tepatnya pada tanggal 2 Maret 1955, dan pada tanggal itu pula ditetapkan sebagai hari lahir IPPNU. Status IPNU-IPPNU dari kongres I sampai VI masih merupakan anak asuh LP Ma'arif, baru kemudian setelah kongres VI di Surabaya tanggal 20 Agustus 1966, IPNU-IPPNU meminta hak otonom pada Nahdlotul Ulama' dengan maksud agar dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Pengakuan otonom ini diberikan dalam Mukhtamar Nahdlotul Ulama' di Bandung pada tahun 1967 yang dicantumkan dalam AD / ART Nahdlotul Ulama' pasal 10 ayat 1 dan 9 dalam Mukhtamar Nahdlotul Ulama' di Semarang tahun 1979, status IPNU-IPPNU terdapat pada pasal 2 AD Nahdlotul Ulama'.

## 2. Perubahan Besar IPNU-IPPNU

Perubahan mendasar dengan merubah akronim dari awal berdiri sampai sekarang telah mengalami tiga kali. Hal ini dikarenakan oleh situasi dan kondisi yang berkembang, pengaruh eksternal terhadap perubahan tak bisa dinafikan. Ekses politik yang berasal dari bias ketakutan penguasa terlihat jelas. Eksistensi IPNU-IPPNU memang tidak bisa dilepaskan dari desain Nahdhotul Ulama', termasuk ekses dari Improvisasi Politik Nahdhotul Ulama' ketika menjadi partai politik (1954-1984). Puncaknya ketika Orde Baru berusaha menancapkan Hegemoni kekuasaannya di sektor pendidikan, IPNU-IPPNU dipaksa memisahkan diri dari lembaga pendidikan sebagai basis utamanya. Maka pada kongres X di Jombang, IPNU terpaksa mengubah kepanjangan akronim menjadi Ikatan Putra Nahdhotul Ulama'. Perubahan nama ini membawa konsekuensi pada perubahan Orientasi dan bidang garap (IPNU-IPPNU) Nahdhotul Ulama'. Ketika gerakan rakyat berhasil melahirkan (pinjam bahasa) reformasi pada tahun 1998 dan mengakibatkan terbukanya kran kebebasan ekspresi rakyat, muncul "Desakan" untuk menegaskan kembali orientasi gerakan IPNU seperti mandat dan misi awal berdiri. Dalam perspektif Nahdhotul Ulama', penegasan orientasi IPNU dilakukan pertama kali dengan mengembalikan akronim IPNU seperti pada awal berdirinya, menjadi Ikatan Pelajar Nahdhotul Ulama'. Keputusan tersebut telah ditetapkan dalam kongres XIV IPNU di Surabaya, tanggal 19-24 Juni 2003.

### 3. Citra Diri IPNU-IPPNU

Citra diri IPNU & IPPNU dilandasi oleh pokok-pokok pikiran bahwa manusia bertanggung jawab melaksanakan misi khalifah, yaitu memelihara, mengatur, dan memakmurkan bumi.

- a. Makna dan fungsi manusia sebagai khalifah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial (horizontal) dan dimensi ilahiah (vertikal)
- b. Sosial bermakna mengenal alam, memikirkannya, dan memanfaatkan alam demi kebaikan dan ketinggian derajat manusia sendiri.
- c. Ilahiah yaitu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di hadapan Allah SWT.

Secara sosiologis manusia merupakan suatu komunitas yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan (moral, nilai sosial dan nilai keilmuan)

#### a. Hakikat IPNU-IPPNU

IPNU-IPPNU adalah wadah perjuangan putra dan putri Nahdlotul Ulama' untuk mensosialisasikan komitmen nilai-nilai kebangsaan, keislaman, keilmuan, kekaderan, dan keterpelajaran dalam upaya penggalian dan pembinaan potensi sumber daya anggota, yang senantiasa mengamalkan kerjanya nyata demi tegaknya ajaran islam Ahlussunah Wal Jama'ah dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila UUD '45.



## b. Orientasi

Orientasi IPNU-IPPNU berpijak pada kesemestaan organisasi dan anggotanya untuk senantiasa menempatkan pergerakan dan zona keterpelajaran dengan kaidah “belajar, berjuang, dan bertaqwa”, yang bercorak dasar dengan wawasan kebangsaan, keislaman, kekaderan, dan keterpelajaran.<sup>19</sup>

- 1) Wawasan Kebangsaan Yaitu wawasan yang dijiwai oleh azaz kerakyatan yang dipimpin oleh hikmay kebijaksanaan, yang mengakui kebinekaan sosial budaya, yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Hakekat dan martabat manusia yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap nasib bangsa dan Negara berlandaskan prinsip keadilan persamaan dan demokrasi.
- 2) Wawasan Keislaman Yaitu menempatkan ajaran agama islam sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam memberikan makna dan arah pembangunan manusia. Ajaran islam sebagai Rahmatan Lil ‘Alamin yang menyempurnakan dan memperbaiki nilai-nilai kemanusiaan. Karwena itu dalam bermasyarakat haruslah bersikap Tawashut dan I’tidal, menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bersikap membangun dan menghindari laku Tathoruf (Ekstrem, melaksanakan kehendak dengan menggunakan kekuasaan dan

---

<sup>19</sup> [www.ipnuippnurantinfklurahan.blogspot.com](http://www.ipnuippnurantinfklurahan.blogspot.com)

kedzoliman), Tasamuh manusia dan lingkungan, amar ma'ruf nahi munkar, memiliki kecenderungan untuk melakukan usaha perbaikan serta mencegah terjadinya kerusakan harkat kemanusiaan dan kerusakan lingkungan, mandiri, bebas, terbuka dan bertanggung jawab dalam berfikir, bersikap dan bertindak.

- 3) Wawasan Keilmuan Menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mengembangkan kecerdasan anggota dan kader, agar menjadi kader-kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi, cita-cita perjuangan dan organisasi, bertanggungjawab dalam mengembangkan dan membentengi organisasi, juga diharapkan dapat membentuk pribadi yang menghayati dan mengamalkan ajaran islam ala Ahlussunah Wal Jama'ah, memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan mengembangkan organisasi kepemimpinan, kemandirian dan kepopuleran.
- 4) Wawasan Kekaderan, Wawasan yang menempatkan organisasi sebagai wadah untuk membina anggota agar menjadi kader-kader yang memiliki komitmen terhadap ideologi, cita-cita perjuangan organisasi, bertanggung jawab dalam mengembangkan dan membentengi organisasi. Membentuk pribadi yang menghayati dan mengamalkan ajaran islam ala Ahlussunah Wal Jama'ah, memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan serta

memiliki kemampuan teknis mengembangkan organisasi kepemimpinan, kemandirian dan kepopuleran.<sup>20</sup>

- 5) Wawasan Keterpelajaran Wawasan yang menempatkan Organisasi dan anggota pada pemantapan diri sebagai Center Of Excellence pemberdayaan sumberdaya manusia terdidik dn berilmu, berkeahlian dan visioner yang diikuti kejelasan misi sucinya, sekaligus strategi dan operasionalisasi yang berpihak kepada kebenaran, kejujuran serta amar ma'ruf nahi munkar. Wawasan ini meniscayakan karakteristik organisasi dan anggotanya untuk senantiasa memiliki hasrat ingin tahu, belajar tarus menerus dan mencintai masyarakat belajar. Mempelajari daya analisis, daya sistesis pemikiran, agar dapat membaca realitas dan dinamika kehidupan yang sesungguhnya, terbuka menerima perubahan, pandangan dan cara-cara barun pendapat baru serta pendapat yang berbeda, menjunjung tinggi nilai, norma, kaidah dan tradisi serta sejarah keilmuan serta berorientasi kemasa depan.

#### 4. Posisi IPNU-IPPNU

##### Intern

IPNU-IPPNU sebagai perangkat dan badan otonom Nahdlotul Ulama', secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-badan otonom lain, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan

---

<sup>20</sup> Ihsanhuda, [www.ipnupringsewu.co.cc/2009/07/ke\\_ipnu-ippnu.html](http://www.ipnupringsewu.co.cc/2009/07/ke_ipnu-ippnu.html)

kebijakan Nahdlotul Ulama', khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing badan otonom hanya dapat dibedakan dengan melihat orientasi target group (kelompok binaan) dan bidang garapan masing-masing.

#### Ekstern

IPNU-IPPNU adalah bagian dari generasi muda Indonesia, yang memiliki tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan Negara republic Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan Nahdlotul Ulama' serta cita-cita bangsa Indonesia.

#### Fungsi

IPNU-IPPNU berfungsi sebagai :

- a. Wadah berhimpun putra dan putri Nahdlotul Ulama' untuk melanjutkan semangat dan nilai-nilai Nahdliyah.
- b. Wadah komunikasi putra dan putri Nahdlotul Ulama' untuk menggalang ukhuwah islamiyah dan mengembangkan syari'at islam.
- c. Wadah kaderisasi putra dan putri Nahdlotul Ulama' untuk mempersiapkan kader-kader bangsa.
- d. Wadah aktualisasi putra dan Putri UN dalam pelaksanaan dan pengembangan syari'at islam.

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran panggilan dan pembinaan (target group) IPNU-IPPNU adalah setiap putra dan putri bangsa yang syarat keanggotaan, sebagaimana ketentuan dalam PADA dan PRT IPNU-IPPNU.

## 5. Sikap dan Nilai

Sikap dan nilai-nilai yang harus dikembangkan anggota IPNU-IPNU adalah sikap dasar keagamaan dan nilai-nilai yang bersumber dari sikap kemasyarakatan Nahdhotul Ulama' yaitu :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran islam
- b. Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi
- c. Menjunjung tinggi sikap keikhlasan dalam berkhidmat dan berjuang
- d. Menjunjung tinggi persaudaraan (al-Ukhuwah), persatuan (al-Ittihad) serta kadis mengasihi
- e. Meluhurkan kemuliaan moral (al-Akhlakul Karimah) dan menjunjung tinggi kejujuran (ash-Shidqu) dalam berpikir,bersikap dan bertindak
- f. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan Negara
- g. Menjunjung tinggi nilai-nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah sebagai ibadah kepada Allah SWT
- h. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahlinya Selalu bersikap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.

## 6. Tujuan Organisasi

Terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah swt., berilmu, berakhlaq mulia, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegaknya syariat Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Di bidang pendidikan IPNU-IPPNU mempunyai tujuan:

- a. Untuk memelihara rasa persatuan dan kekeluargaan di antara pelajar umum, santri dan mahasiswa.
- b. Membina dan meningkatkan pendidikan dan kebudayaan Islam.
- c. Meningkatkan harkat masyarakat Indonesia yang berasusila dan mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara.

## 7. Trilogi IPNU-IPPNU

Konsep dasar perjuangan IPNU di masyarakat pelajar

Belajar – Berjuang – Bertaqwa.

## 8. Visi IPNU-IPPNU

Visi IPNU-IPPNU adalah terbentuknya putra putri bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlaq mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya Syariat Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## 9. Misi IPNU-IPPNU

- a. Menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah

organisasi IPNU-IPPNU

- b. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa
- c. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (masalah Al-Amah), guna terwujudnya Khaira Ummah
- d. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi

#### 10. Struktur Organisasi IPNU

- a. Pimpinan tertinggi IPNU di ibu kota Negara disebut Pimpinan Pusat IPNU (PP IPNU)
- b. Pimpinan IPNU di provinsi disebut Pimpinan Wilayah IPNU (PW IPNU)
- c. Pimpinan IPNU di kabupaten/kota disebut Pimpinan Cabang IPNU (PC IPNU)
- d. Pimpinan IPNU di kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang IPNU (PAC IPNU)
- e. Pimpinan IPNU di desa/kelurahan disebut Pimpinan Ranting IPNU (PR IPNU)
- f. Pimpinan IPNU di Lembaga Pendidikan perguruan tinggi, pondok pesantren, SLTP/MTs, SLTA/MA dan yang sederajat disebut Pimpinan Komisariat IPNU (PK IPNU)

## C. Konsep Pendidikan Nonformal

### 1. Latar belakang pendidikan nonformal

Pendidikan formal, informal, dan nonformal sebagai bagian dari *continuing education* dan *lifelong education*, ketiganya tidak dapat terpisahkan dan berdiri sendiri. Ketiganya saling mengisi terutama dalam;<sup>21</sup> 1) memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat (selama masyarakat itu ada). Masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman lainnya tidak hanya cukup dengan pendidikan formal saja, akan tetapi masyarakat perlu memperoleh pendidikan lain sebagai (*complementary*) baik melalui pendidikan informal maupun pendidikan nonformal. Mak pendidikan formal, informal, dan nonformal akan secara terintegrasi dibutuhkan oleh masyarakat agar pengetahuan dan kemampuan yang diperlehnya menjadi lebih utuh (komplit). 2) pengembangan pendidikan sepanjang hayat melalui pendidikan formal, informal, dan nonformal yang terintegrasi akan memudahkan masyarakat dalam memilih pendidikan mana yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan diri serta sesuai dengan keahlian (kompetensi) yang diperlukan bagi kehidupan.

Ketika seseorang memilih pendidikan formal, kemudian berhenti pada satu titik tertentu karena pendidikan formal dibatasi kesempatan dan waktu, atau dia tidak diperkenankan untuk memperoleh pendidikan formal karena usia atau putus pendidikan formal (drop out), dan karena berbagai hal sehingga seseorang

---

<sup>21</sup> Mustofa kamil, *Pendidikan Nonformal (Pengembangan Melalui PKBM di Indonesia*, (Bandung:alfabeta,2009),hlm1



tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengikutinya, maka pada saat itulah pendidikan informal dan nonformal dibutuhkan untuk melayaninya (subtituto). Ketika seseorang tidak cocok dengan pendidikan formal atau ada beberapa materi yang tidak diperoleh melalui pendidikan formal dia akan mendapat tambahan secara bebas melalui pendidikan informal atau nonformal (suplementary).

Selain konsep dasar pendidikan nonformal yang sudah dijelaskan diatas, *Saleh Marzuki* dalam bukunya *pendidikan nonformal dimensi dalam keaksaraan fungsional, pelatihan, dan andragogi* juga menyebutkan konsep dasar pendidikan nonformal di bagi menjadi empat:<sup>22</sup>

Konsep dasar yang pertama, Pendidikan dipandang sebagai proses belajar sepanjang hayat manusia. Artinya, pendidikan merupakan upaya manusia untuk mengubah dirinya ataupun orang lain selama ia hidup. Pendidikan hendaknya lebih dari sekedar masalah akademik atau perolehan pengetahuan, skill dan mata pelajaran secara konvensional, melainkan harus mencakup berbagai kecakapan yang diperlukan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Karena itu, pendidikan hendaknya meliputi keterampilan kerumahtanggaan (house hold skills), apresiasi terhadap estetika (esthetic appreciation), berfikir analitik (analitic thinking), pembentukan sikap (formation of attitude), pembentukan nilai-nilai dan aspirasi (formation of values and aspiration),

---

<sup>22</sup> Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, Dan Andragogi*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya: 2010),hlm.136-140

asimilasi pengetahuan yang berguna (*assimilation of pertinent knowledge*), dan informasi tentang berbagai hal dalam kehidupan (*information of any sort*).

Pendidikan adalah proses berkelanjutan (*education is a continuing process*). Pendidikan mulai dari lahir sampai dewasa dan berlanjut sampai mati, yang memerlukan berbagai metode dan sumber-sumber belajar.

Konsep Dasar Yang Kedua, Konsep dasar yang kedua adalah kebutuhan belajar minimum yang esensial (*minimum essential learning needs*). Yang dimaksud dengan kebutuhan belajar disini adalah sesuatu yang harus diketahui dan dapat dikerjakan oleh anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum mereka merasa bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Setiap anak mempunyai hak untuk mendapatkan paket minimum berupa pengetahuan, skill dan sikap untuk menjadi manusia dewasa yang efektif dan memuaskan. Dalam hal ini, kriterianya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lain, wilayah yang satu dengan yang lain.

Ada enam unsur sebagai paket minimum yang disarankan oleh Saleh Marzuki yang mengutip dalam bukunya Coombs: 1) sikap positif terhadap kerjasama dan membantu keluarga serta anggotanya, terhadap pekerjaan, terhadap masyarakat, terhadap pembangunan bangsa, dan terhadap nilai-nilai etis; 2) keaksaraan fungsional yang meliputi membaca dengan paham artinya, menulis dengan huruf yang benar, meminta informasi, dan menghitung hal-hal yang umum; 3) cara pandang ilmiah dan pemahaman sederhana tentang proses-proses alamiah, seperti terhadap kesehatan, nutrisi, lingkungan dan perlindungan

terhadapnya; 4) pengetahuan dan skill fungsional untuk mengasuh keluarga dan menjalankan suatu rumah tangga; 5) pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mencari nafkah, bukan hanya skills guna memasuki suatu pekerjaan lokal, tetapi juga untuk pertanian dan diluar pertanian; 6) pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk berperan serta sebagai warga negara, seperti memahami sejarah, struktur dan fungsi pemerintah, pajak, pendapatan, layanan-layanan sosial yang tersedia, dan sebagainya.<sup>23</sup>

Konsep dasar ketiga, Proses pertumbuhan manusia dalam masyarakat transisi memerlukan layanan pendidikan guna membantu pertumbuhan individu secara efektif. Perjalanan anak menuju proses dewasa melalui beberapa tahapan masa balita, masa kanak-kanak (6-12 tahun) yang terkait dengan kebutuhan akan sekolah dasar, masa remaja (13-18 tahun) yang terkait dengan kebutuhan sekolah menengah, dan pascaremaja atau dewasa awal (19-24 tahun) terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan tinggi atau sekolah menengah. Pada masa itu bisa terjadi persiapan-persiapan dan perencanaan ataupun pelaksanaannya kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan belajar minimum bagi anak laki-laki dan perempuan, khususnya di pedesaan yang relatif belum tersentuh modernisasi, terutama di negara berkembang.

Konsep Dasar Keempat, Konsep dasar keempat terkait dengan peran pendidikan dalam pengembangan pedesaan. Para pakar telah banyak menulis tentang pembangunan nasional menyeluruh. Namun pada umumnya mereka

---

<sup>23</sup> Ibid.,h.138

mengabaikan pentingnya bagian pembangunan nasional yang terjadi di wilayah pedesaan. Hampir semua negara sedang berkembang ditandai dengan kesulitan ekonomi dan dualisme sosial, yaitu dualisme antara sektor perkotaan yang modern dan sektor pedesaan yang tradisional. Meskipun dalam perencanaan nasional prioritas diletakkan pada pembangunan pedesaan, semua negara berkembang memprioritaskan dana pembangunannya pada pembangunan kota, dengan mendasarkan diri pada teori bahwa kemajuan di kota akan memberikan tetesan ke daerah pedesaan. Kenyataannya, dampak tersebut sangatlah lemah bahkan timbul kesenjangan antara desa dan kota.

Jadi, secara mendasar pendidikan formal, informal, dan nonformal sebagai sebuah konsep pendidikan dalam rangka pendidikan sepanjang hayat dan belajar sepanjang hayat, memiliki berbagai ragam program sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat masa kini maupun masa depan. Masyarakat tidak akan berkembang pengetahuannya dan keterampilannya apabila hanya mengandalkan pendidikan formal, oleh karena itu kebutuhan akan layanan pendidikan informal dan nonformal sangat dirasakan dalam menunjang kehidupan masyarakat terutama dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga variasi layanan program pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat merupakan sebuah wujud dari *lifelong education*.

## 2. Definisi dan peran pendidikan nonformal

Menurut mustofa kamil yang mengutip dari bukunya sudjono, Pendidikan nonformal dengan berbagai atribut dan nama atau istilah, baik disebut dengan *mass education, adult education, lifelong education, learning society, out of school education, sosial education dll*, merupakan kegiatan yang terorganisir dan sistematis yang diselenggarakan di luar subsistem pendidikan formal.<sup>24</sup>

Meskipun kesemua istilah tersebut memiliki perbedaan dan kesamaan dengan pendidikan nonformal, akan tetapi sangat sulit untuk merumuskan pengertian yang komprehensif dan berlaku umum, mengingat titik pandang yang berbeda. Berikut ini diuraikan beberapa definisi tentang pendidikan nonformal yang di kemukakan oleh para ahli.<sup>25</sup>

- a. Pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara sistematis dan continue diluar sistem persekolahan, melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup dibidang materil, sosial dan mental dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Hamojoyo (1973:vii)
- b. Secara luas coombs (1973:11) memberikan rumusan tentang pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisasi, diselenggarakan diluar pendidikan persekolahan, diselenggrakan secara

---

<sup>24</sup> Mustofa kamil, *Pendidikan Nonformal Pengembangan....* (bandung: ALFABETA,2009),hlm13

<sup>25</sup> Ibid., Hlm 13-14

tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas dengan maksud memberikan layanan khusus warga didalam mencapai tujuan belajar.

- c. Niehoff, (1977:8) merumuskan pendidikan nonformal secara terperinci yakni nonformal education is defined for our purpose as the method of assessing the needs and interest of adult and of out school youth in developing countries-of communicating with them, motivating them to patterns, and related activities which will increase their productivity in improve their living standard.
- d. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan sosial dalam hal ini adalah semua kegiatan pendidikan termasuk didalamnya pendidikan olahraga dan rekreasi yang diselenggarakan diluar sekolah bagi pemuda dan orang dewasa, tidak termasuk kegiatan-kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan kurikulum sekolah. (artikel.2) lifelong learning in japan (1992:39)

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa pendidikan nonformal dalam proses penyelenggaraannya memiliki suatu sistem yang terlembagakan, yang di dalamnya terkandung makna bahwa setiap pengembangan pendidikan nonformal perlu perencanaan program yang matang, melalui kurikulum, isi program, sarana, prasarana, sasaran didik, sumber belajar, serta faktor-faktor yang satu sama lain tak dapat dipisahkan dalam pendidikan nonformal.

Pengungkapan istilah pendidikan nonformal memberikan informasi bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak hanya diselenggarakan di pendidikan formal saja, akan tetapi juga di pendidikan nonformal. Dalam hal ini sesuai dengan undang-undang RI No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 1 ayat (10) satuan pendidikan adalah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; ayat (11) pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan atas; ayat (12) pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; ayat (13) pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Berdasarkan pada isi undang-undang diatas, maka pendidikan nonformal merupakan salah satu jalur dari penyelenggaraan sistem pendidikan di indonesia.

Pendidikan nonformal di selenggarakan melalui tahapan-tahapan pengembangan bahan belajar, pengorganisasian kegiatan belajar, pelaksanaan belajar mengajar dan penilaian. Hal ini sejalan dengan pendapat knowles yang dikutip oleh mustofa kamil,<sup>26</sup> bahwa langkah-langkah pengelolaan kegiatan belajar meliputi: a) menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar; b) menetapkan struktur organisassi pengelolaan program belajar; c) mengidentifikasi kebutuhan belajar; d) merumuskan arah dan tujuan belajar; e)

---

<sup>26</sup> Ibid., H. 16

menyusun pengembangan bahan belajar; f) melaksanakan kegiatan belajar; g) melakukan penilaian.

Bahan belajar yang disediakan pada pendidikan nonformal mencakup keseluruhan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan nonformal saat ini semakin dibutuhkan oleh masyarakat karena berbagai alasan meliputi: a) kemajuan teknologi; b) kebutuhan pendidikan keterampilan yang tidak bisa dijawab oleh pendidikan formal; c) keterbatasan akses pendidikan formal untuk menjangkau masyarakat suku terasing, masyarakat nelayan, pedalaman, serta masyarakat miskin yang termarjinalkan; d) persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kehidupan dan perkembangan masyarakat terutama berkaitan dengan: 1) penambahan penduduk dan pencemaran lingkungan; 2) keinginan untuk maju; 3) perkembangan alat komunikasi; dan 4) terbentuknya bermacam-macam organisasi sosial.

Berdasarkan pada kriteria diatas, kebutuhan pendidikan nonformal semakin nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut persoalan pendidikan maupun persoalan sosial lainnya.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang bermacam-macam di masyarakat, maka mustofa kamil mengelompokkan program pendidikan nonformal menjadi dua kelompok, yaitu:



- a. Program pendidikan dasar, yang memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan-kemampuan dasar, seperti program literasi.
- b. Program pendidikan lanjutan, yang memberikan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada sasaran pengembangan kelompok pertama pendidikan nonformal memiliki peran mendasar dalam rangka membangun kemampuan dasar masyarakat (sasaran didiknya), terutama dalam implementasi belajar sepanjang hayat. Maka pendidikan nonformal memiliki tugas bukan hanya sekedar tuntutan wajib belajar pendidikan sembilan tahun akan tetapi yang paling penting mencerdaskan masyarakat pada level literasi (pembebasan buta huruf) berarti membuka wawasan dan cakrawala masyarakat kearah kemajuan dan perubahan hidup dan kehidupan baru. Program pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal jangan hanya dikategorikan sekedar menyelesaikan masalah tingginya angka drop out pendidikan dasar dan menjadi sorotan dunia internasional yang berpengaruh terhadap HDI (*Human Development Index*), akan tetapi tugas ini harus dianggap sebagai suatu kewajiban dalam menata lifelong education pada tingkat awal.

### 3. Tugas pokok pendidikan nonformal

Kesaling tergantung antara pendidikan formal dan nonformal semakin nyata ketika berbagai negara merasa perlu mengembangkan pendidikan nonformal bagi warga negaranya. Keperluan itu memang berbeda antara negara maju dan negara berkembang, yang dipengaruhi oleh perkembangan sekolah di masing-masing negara. Hal yang sama juga terjadi antara negara industri dan di dalam negara berkembang itu sendiri.

#### a. Tugas Pendidikan nonformal di negara industri

Dalam kaitannya dengan pendidikan formal di negara industri, dalam hal mana semua anak sebelum usia 15 tahun secara penuh wajib mengikuti sekolah, maka pendidikan nonformal (PNF) memiliki tugas sebagai berikut: 1) pendidikan nonformal membantu menyiapkan anak-anak sekolah prasekolah untuk memasuki sekolah play group, pusat pengasuhan, program pendidikan melalui televisi dll; 2) bertugas melengkapi atau *complement* sekolah dengan memberikan pengalaman belajar melalui ekstrakurikuler seperti olahraga, kegiatan seni dan budaya, organisasi remaja dan pemuda; 3) PNF menindak lanjuti sekolah dengan menyajikan berbagai program pendidikan berkelanjutan atau kesempatan pendidikan lanjut setelah keluar dari sekolah atau menyelesaikan sekolah. Dalam memenuhi kebutuhan seperti ini para pengelola PNF lebih beruntung karena yang dihadapi adalah orang-orang yang sudah memiliki dasar-dasar yang kuat untuk dikembangkan.

b. Tugas Pendidikan nonformal di negara berkembang

Di negara berkembang yang perkembangan ekonomi dan pendidikannya lebih tinggi, PNF memiliki peran yang sama dengan di negara industri. Di sebagian negara berkembang peranan ini sangat berbeda, oleh karena banyak anak khususnya di pedesaan dan daerah terpencil, yang tidak dapat mengikuti atau menyelesaikan sekolah dasar maupun menengah. Ini menghasilkan sasaran didik remaja ataupun pemuda yang tidak pernah atau drop out sekolah.

Tugas PNF dimulai dengan mengidentifikasi jumlah mereka yang tidak pernah sekolah, yang drop out, dan yang tidak melanjutkan sekolah, yang kemudian mencoba menyediakan program-program pendidikan yang memenuhi kebutuhan mereka dengan mengajarkan baca tulis dan pengalaman belajar lainnya, yang tentu sangat sulit karena beraneka ragamnya kebutuhan mereka.

Apabila dicermati, sebagaimana pendapat Saleh Marzuki sebenarnya tugas dari pendidikan nonformal adalah:<sup>27</sup> 1) sebagai persiapan memasuki dunia sekolah; 2) sebagai suplemen atau tambahan pelajaran karena mata pelajaran yang disajikan disekolah terbatas; 3) sebagai kmplemen atau pelengkap karena kecakapan tertentu memang tidak diajarkan di sekolah, tetapi tetap dipandang perlu, sementara kurikulum sekolah tidak mampu menampungnya; 4) sebagai pengganti karena anak-anak

---

<sup>27</sup> Saleh Marzuki, *Pendidikan Nonformal Dimensi.....* (bandung: PT.Remaja Rosdakarya:2010), h.141

yang tidak pernah sekolah harus memperoleh kecakapan.

#### 4. Filsafat Dan Teori Pendidikan Nonformal

Berbicara tentang *philosophy* dan teori pendidikan nonformal, tidak terlepas dari pemahaman konsep tentang kegiatan belajar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau dikenal dengan istilah *learning society*. Terciptanya masyarakat gemar belajar (*learning society*) sebagai wujud nyata model pendidikan sepanjang hayat mendorong terbukanya kesempatan menurut setiap orang, masyarakat, organisasi, institusi social untuk belajar lebih luas. Sehingga tumbuh semangat dan motivasi untuk belajar mandiri terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat, dan memperkuat keberdayadidikan (*educability*) agar mampu mendidik diri dan lingkungannya.

Masyarakat gemar belajar dapat menciptakan peluang pendidikan nonformal di tempat yang mudah dijangkau dengan cara-cara yang sesuai dengan ; potensi, keterampilan dan kecakapan warga belajar serta sesuai dengan kebutuhan dalam kehidupannya. Belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*) sebagai core pembuka akses bagi pendidikan nonformal adalah kunci memasuki abad baru bagi warga belajar. Dengan pendidikan nonformal warga belajar didorong belajar menguasai kompetensi tertentu supaya dapat hidup dalam situasi yang berubah-ubah dan belajar untuk hidup lebih mandiri dan bertanggung jawab baik kepada diri pribadinya maupun kepada masyarakatnya. Di samping itu, melalui pendidikan nonformal warga belajar mampu belajar

untuk hidup bersama orang lain terutama dalam membangun rasa kebersamaan dan saling ketergantungan serta kemampuan dalam menganalisis resiko dan menganalisis tantangan masa depan dengan cara cerdas dan damai.

Hakikat keilmuan dalam proses pembelajaran pendidikan nonformal adalah mempelajari proses pembentukan kepribadian manusia dan kegiatan belajar yang dirancang secara sadar dan sistematis dalam interaksi antara tutor / sumber belajar dan warga belajar. Kepribadian adalah kondisi dinamis yang merupakan keterpaduan antara pola berpikir, sikap, dan pola tingkah laku warga belajar dan sumber belajar. Pembentukan kepribadian dapat mencakup proses transfer dan transformasi pengetahuan, sikap dan perilaku mengenai aspek logika, etika dan estetika yang masing-masing mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pendidikan nonformal selalu terkait dengan norma tertentu, fakta empiris pendidikan nonformal selalu sarat nilai dalam arti bahwa setiap fakta selalu ditafsirkan dengan mengacu pada norma tertentu serta dalam konteks tujuan tertentu. Sehubungan dengan hal itu Mustofa Kamil mengutip pendapatnya Sutaryat Trisnamansyah (1995:3) menyimpulkan bahwa :<sup>28</sup>

- a. Interaksi sosial budaya antara warga belajar dan sumber belajar mengandung arti, proses pendidikan itu berlangsung secara sadar, dengan duwujudkan melalui media tertentu dan situasi lingkungan tertentu, dapat ditinjau dari aspek mikro dan aspek makro, sarat makna dan nilai serta

---

<sup>28</sup> Mustofa Kamil, *Pendidikan Nonformal Pengembangan....* (bandung: ALFABETA,2009),hlm 27

terarah pada pengembangan kemandirian melalui proses belajar sepanjang hayat.

- b. Tujuan pendidikan nonformal yang ingin dicapai melalui interaksi tersebut terkandung makna pengembangan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Secara lebih khusus tujuan itu juga mencakup ; pelayanan terhadap warga belajar, pembinaan warga belajar, dan memenuhi kebutuhan warga belajar dan masyarakat yang tidak terpenuhi melalui jalur formal (sekolah). (Sutayat T, 1995:4)

Ilmu pendidikan nonformal memiliki landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan nonformal merupakan dasar tempat berpijak, mengkaji dan menelaah kegiatan pendidikan nonformal. Kata filosofis, dari kata filsafat, berarti cenderung ke arah filsafat. Kemudian filsafat sendiri dapat diartikan sebagai suatu metode berfikir, cara memandang atau melihat sesuatu secara komprehensif. Sebagai suatu metode, filsafat merupakan cara berfikir menganalisis dan mengutak-atik pendidikan nonformal secara mendalam sehingga kehadiran pendidikan nonformal pada dunia pendidikan khususnya dan kehidupan manusia pada umumnya dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai suatu cara pandang, filsafat diharapkan dapat member suatu nilai dan pemikiran mengenai eksistensi, landasan dan pedoman pendidikan nonformal sehingga

dapat memberi nilai tambah dan kontribusi terhadap individu atau masyarakat dalam menyikapi hidup dan kehidupannya.

Landasan filosofis pendidikan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh landasan ideologi yang dianut oleh bangsa itu sendiri. Mengacu pada landasan ideologi bangsa, maka falsafah pendidikan yang dijadikan dasar atau landasan fundasional pendidikan nonformal, mempunyai sifat spekulatif, preskriptif, dan analitik. Sifat spekulatif ini muncul tatkala falsafah pendidikan menelusuri teori-teori yang berhubungan dengan hakikat manusia, masyarakat, dan dunia. Penelusuran teori-teori ini dilakukan melalui pengkajian hasil-hasil penelitian dan berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku manusia (*behavioral sciences*). Sifat preskriptif timbul ketika falsafah pendidikan merinci tujuan-tujuan pendidikan yang harus dicapai dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Sifat analitik muncul pada waktu falsafah pendidikan menguji dasar-dasar pikiran yang digunakan dalam rumusan tentang gagasan-gagasan pendidikan.

Ada dua kategori yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pokok-pokok utama filsafat pendidikan yang dipandang melandasi eksistensi dan pentingnya pendidikan nonformal sesuai dengan sifat tersebut; *Pertama*, filsafat sebagai suatu *metoda* dan yang *kedua* filsafat sebagai suatu *pandangan*.<sup>29</sup> Sebagai suatu metoda filsafat dapat ditelusuri dari cara berfikir dan cara menganalisis pendidikan nonformal yang dapat dipertanggung-jawabkan.

---

<sup>29</sup> Ibid., h.30

Sedangkan filsafat sebagai suatu pandangan memberikan suatu nilai serta pemikiran mengenai persepsi, landasan dan pedoman tingkah laku seseorang (individu) atau masyarakat dalam seluruh kehidupan dan cita-citanya. Sebagai suatu *metoda filsafat* penting dalam menganalisis Pendidikan Nonformal :

- a. Pendidikan nonformal dalam konteks pengembangan programnya seringkali berhubungan dengan pemecahan masalah yang dihadapi manusia, terutama masalah yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan, keterampilan dan keahlian khusus yang tidak dapat ditemukan dalam konteks pendidikan persekolahan.
- b. Dalam penyelenggaraan program pendidikan nonformal memiliki karakteristik sasaran didik tersendiri, yang secara filosofis karakteristik tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan sasaran didik pendidikan formal.
- c. Mengembangkan satu bentuk program pendidikan nonformal diperlukan adanya idealisme bagi tercapainya keberhasilan program tersebut.
- d. Dalam pengembangn program pendidikan nonformal penelusuran minat, bakat dan kebutuhan adalah merupakan daya dukung tersendiri bagi pencapaian tujuan program secara utuh dan dapat diterapkan dalam kehidupannya (*learning to be*).



#### **D. Peran IPNU - IPPNU Dalam Mengembangkan Pendidikan agama islam Bagi anggota yang putus sekolah melalui pendidikan Non Formal.**

Kembalinya Ikatan Putra Nahdlatul Ulama ke Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang di hasilkan pada kongres di Surabaya XIV tahun 2003 dan di mantapkan pada kongres di Jakarta tahun 2006, menjadi prasasti sejarah bagi era baru perjuangan IPNU merambah dunia pendidikan. Implikasi dari perubahan orientasi kembali ke pelajar adalah memperjuangkan terpenuhinya hak-hak pelajar. Tidak sekedar melakukan proses kaderisasi melalui institusi pendidikan, lebih dari sekedar itu harus terumuskan pula secara filosofi, strategi memperjuangkan dunia pendidikan Indonesia di era globalisasi saat ini.

Kita mengetahui bahwa Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat belajar menghadapi alam semesta demi mempertahankan hidupnya. Ditinjau dari sisi filsafat pendidikan, memang manusia adalah yang layak dan memiliki potensi untuk belajar dan mengajar.<sup>30</sup> Mungkin karena itu pula, alasan Islam menempatkan pendidikan dalam kedudukan yang sangat tinggi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

---

<sup>30</sup> Drs. H. A. Mustofa, *Filsafat Islam* ( Bandung: CV Pustaka Setia)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

*Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>31</sup>*

Dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diantaranya adalah mencerdaskan anak bangsa. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut bukanlah hal yang sederhana. Dimana harus adanya Perananan atau pelaksanaan pendidikan demi tercapainya cita – cita bangsa Indonesia, untuk mewujudkan itu semua diperlukan kerjasama dari semua pihak khususnya IPNU-IPPNU sebagai organisasi kepemudaan.

Dalam UU No 20 tahun 2003 pasal 30 berbunyi pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal.<sup>32</sup> Mengingat pembahasan dalam pendidikan Islam cukup kompleks dan luas maka sudah sewajarnya akan membutuhkan waktu yang

<sup>31</sup> Al-qur'an dan Terjemahannya, Juz 28, hlm 910

<sup>32</sup> Depdiknas RI. (2003). *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Jakarta : Depdiknas)

panjang dan sarana prasarana yang mendukung karna ilmu di dunia ini sangat terhampar luas, dan ilmu pengetahuan tidak selesai pada tataran tekstual karna masih harus digali dan dikembangkan seperti firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 48:

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَزِيءَ الْوَدْقَ تَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ ۖ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya:

*Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu Lihat hujan keluar dari celah-celahnya, Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.*<sup>33</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan harus digali dan dikembangkan agar bisa secara *komprehensif* mendapatkan satau pengetahuan, dan itu semua membutuhkan waktu yang panjang. Akan tetapi sesuai yang kita ketahui bahwasannya Pendidikan Islam yang diselenggarakan pada pendidikan formal sangat terbatas, padahal pendidikan Islam merupakan pendidikan yang sangat esensial dimana dengan pendidikan Islam bisa digunakan untuk memfilter budaya bangsa barat yang masuk ke Indonesia, karena dengan Pendidikan Islam bisa membentuk Insan kamilah dengan

<sup>33</sup> Al-qur'an dan Terjemahannya, Juz 21, hlm 648

akhlaqul karimah. Maka dari itu Pendidikan Islam selain diselenggarakan di pendidikan formal juga perlu ditambah dengan pendidikan non formal sebagai penyempurna pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pendidikan formal.<sup>34</sup>

Pendidikan harus dipandang sebagai suatu konteks interdisiplin sebagai factor pembangunan yang multidimensional dimana manusia menjadi tujuan sekaligus juga sebagai instrument. Manusia sebagai tujuan pembangunan artinya manusia menjadi subjek didik yang harus ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan, sedangkan sebagai instrument maksudnya bahwa manusia menjadi pelaku pembangunan yang harus memiliki kemampuan tinggi untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa dan Negara.

La Belle (1976) menyatakan bahwa di Amerika Latin, pendidikan Non formal merupakan contoh upaya untuk menciptakan perubahan sosial pada tingkat lokal. Pada pendidikan Non formal ada dua penekanan dalam upaya mencapai tujuan, yaitu perubahan tingkah laku dan perubahan social. Perubahan tingkah laku ditujukan kepada indiviu – individu anggota masyarakat, yaitu adanya perubahan setelah intervensi pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Perubahan yang akan meningkatkan kualitas kinerja individu dalam mengatasi masalah dan kebutuhan hidupnya atau kesulitan hidupnya. Pendidikan Non formal

---

<sup>34</sup> Dra. Hj. Nuryanis, Drs.H. Romli M.Hum, *Pendidikan Luar Sekolah*,( Jakarta: Departemen Agama RI ) hal 4

diarahkan pada penumbuh kembangan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atau kesejahteraan diri dan masyarakatnya. Dalam hubungan ini, pendidik harus menggunakan pendekatan psikologis, artinya dia harus menguasai psikologi belajar, psikologi kepribadian dan psikologi perkembangan. Dengan kualitas individu yang lebih baik, kita harapkan keluarga dan masyarakat khususnya para generasi muda dapat menjadi lebih baik dapat menjadi generasi penerus bangsa yang bisa menjadi pemimpin yang berkualitas baik dari keilmuan maupun akhlakul karimah.